

Pansus "CSR" Sentil

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

dimaksudkan agar perusahaan diwajibkan melaksanakan tanggung jawabnya yakni penyaluran CSR. Jika tidak, ada sanksi yang bisa dilayangkan pemerintah daerah berupa peringatan, pembatasan usaha sampai pembekuan izin.

"Ke depan jika raperda ini selesai harus ada forum tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

ini dari berbagai elemen masyarakat," katanya.

Tak hanya itu saja, saat ini Pemkab Karawang memiliki wadah Forum CSR yang kata Ibe diketuai oleh sekda yang kinerjanya kurang efektif. DPRD mendesak adanya evaluasi nantinya Forum CSR diusulkan diisi tokoh masyarakat, akademisi, juga perwakilan asosiasi perusahaan.

"Kami mendorong forum CSR itu dievaluasi karena kami menilai penggunaan anggaran CSR itu tidak transparan," katanya.

Ia menambahkan, ke depan jika raperda ini sudah disahkan, diharapkan anggaran CSR dari perusahaan bisa disalurkan untuk pembangunan masyarakat dan sifat anggarannya itu transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. (bbs/mhs)